

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.04.2.692056/2026**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 01
Tanggal : 27 Desember 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
- 3. Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
- 4. Kode/Nama Satker : (692056) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN
- Sebesar : Rp. 2.432.174.000 (DUA MILIAR EMPAT RATUS TIGA PULUH DUA JUTA SERATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 135.04.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
- 135.04.BF.7110 Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 2.432.174.000
Rp. 2.432.174.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 0 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 2.432.174.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN BANJARMASIN (045) Rp. 2.432.174.000

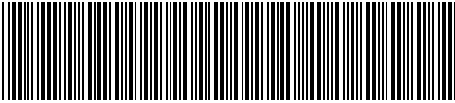
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692056/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:7845-8120-9836-2000

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
Kode>Nama Satker : (692056) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN

										Halaman : I A. 1	
Program	:	135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							2.432.174.000	
Kegiatan	:	7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah							2.432.174.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:										
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya					4,00	layanan	1.667.142.000
Rincian Output	:	01	BAH.001	Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah					4.00	layanan	1.667.142.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga					1,00	Perkara	30.148.000
Rincian Output	:	01	BCB.001	Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah					1.00	Perkara	30.148.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga					7,00	Lembaga	707.914.000
Rincian Output	:	01	BIC.001	Pengawasan Kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah					7.00	Lembaga	707.914.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7110.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan					1,00	Laporan, Layanan	26.970.000
Rincian Output	:	01	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah					1.00	Laporan	26.970.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692056/2026
I B. SUMBER DANA



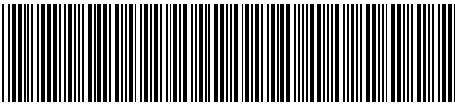
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
Kode>Nama Satker : (692056) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	2.432.174.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692056/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



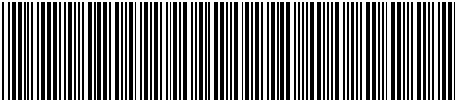
DS:7845-8120-9836-2000

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
Kode>Nama Satker : (692056) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692056	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN	-	2.432.174	-	-	-	2.432.174	15 . 51	
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	2.432.174	-	-	-	2.432.174		
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	-	2.432.174	-	-	-	2.432.174		
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (15.51 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARMASIN)	-	1.667.142	-	-	-	1.667.142		
04	PNBP	-	1.667.142	-	-	-	1.667.142		
7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga (15.51 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARMASIN)	-	30.148	-	-	-	30.148		
04	PNBP	-	30.148	-	-	-	30.148		
7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (15.51 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARMASIN)	-	707.914	-	-	-	707.914		
04	PNBP	-	707.914	-	-	-	707.914		
7110.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (15.51 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARMASIN)	-	26.970	-	-	-	26.970	15 . 51	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692056/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:7845-8120-9836-2000

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
Kode/Nama Satker : (692056) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN
Kewenangan : (KD)

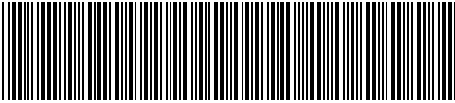
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	[51] 3	[52] 4	[53] 5	[57] 6	[58] 7	8	9	10
04	PNBP	-	26.970	-	-	-	26.970	045@	
JUMLAH		-	2.432.174	-	-	-	2.432.174		

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692056/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:7845-8120-9836-2000

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
Kode/Nama Satker : (692056) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN

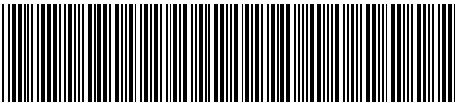
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	692056	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN														
		RENCANA PENARIKAN DANA	198.266	202.615	202.615	202.615	202.615	202.615	202.615	202.615	206.965	202.615	202.615	202.615	203.406	2.432.174
		BELANJA BARANG	198.266	202.615	202.615	202.615	202.615	202.615	202.615	202.615	206.965	202.615	202.615	202.615	203.406	2.432.174
		Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	198.266	202.615	202.615	202.615	202.615	202.615	202.615	202.615	206.965	202.615	202.615	202.615	203.406	2.432.174
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	198.266	202.615	202.615	202.615	202.615	202.615	202.615	206.965	202.615	202.615	202.615	203.406	2.432.174	

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692056/2026
IV A. B L O K I R

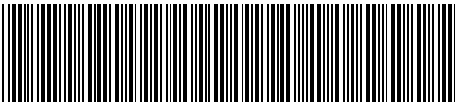


DS:7845-8120-9836-2000

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [15] KALIMANTAN SELATAN
Kode dan Nama Satker : [692056] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692056	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN		Prioritas Direktif Presiden TA 2026
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 935.284	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	52 Belanja Barang Rp. 935.284	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 22.524
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		Prioritas Direktif Presiden TA 2026
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(PNBP)	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 137.239		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 55.965
	Prioritas Direktif Presiden TA 2026		Prioritas Direktif Presiden TA 2026
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521213	Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.325		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 85.100
	Prioritas Direktif Presiden TA 2026		Prioritas Direktif Presiden TA 2026
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522141	Belanja Sewa(PNBP)	7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 15.000	521211	Belanja Bahan(PNBP)
	Prioritas Direktif Presiden TA 2026		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 340
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Prioritas Direktif Presiden TA 2026
522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 11.610	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Prioritas Direktif Presiden TA 2026		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.369
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Prioritas Direktif Presiden TA 2026
522191	Belanja Jasa Lainnya(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 70.535	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
	Prioritas Direktif Presiden TA 2026		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 946
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Prioritas Direktif Presiden TA 2026
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 208.455		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692056/2026
IV A. B L O K I R



DS:7845-8120-9836-2000

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [15] KALIMANTAN SELATAN
Kode dan Nama Satker : [692056] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN

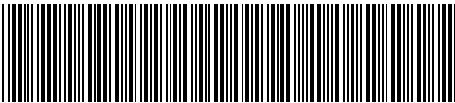
Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(PNBP)	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 13.200	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.383	
	Prioritas Direktif Presiden TA 2026	Prioritas Direktif Presiden TA 2026	
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 164.600		
	Prioritas Direktif Presiden TA 2026		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.040		
	Prioritas Direktif Presiden TA 2026		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7110.FAE	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 74.156		
	Prioritas Direktif Presiden TA 2026		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.521		
	Prioritas Direktif Presiden TA 2026		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 44.465		
	Prioritas Direktif Presiden TA 2026		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7110.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.511		
	Prioritas Direktif Presiden TA 2026		

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692056/2026
IV B. C A T A T A N



DS:7845-8120-9836-2000

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [15] KALIMANTAN SELATAN
Kode dan Nama Satker : [692056] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO